



# Siaran Pers

## Konferensi DPR dan Parlemen Pasifik Ditutup, Sejumlah Komitmen dan Pandangan Berhasil Disepakati

Badan Kerja Sama Antar-  
Parlemen (BKSAP)  
DPR RI

Sekretariat:  
Ged. Nusantara III,  
Lt. 4Jl. Jend. Gatot  
Subroto Jakarta  
10270 Indonesia

Website:  
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:  
[@bksapdpri](https://twitter.com/bksapdpri)

Instagram:  
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:  
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negaralain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut,  
silakan menghubungi Biro  
KSAP:  
021-5715814  
[biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

Jakarta, 27/7/2024- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menutup perhelatan *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) ke-2, Kamis (25/7), di Hotel Fairmont, Jakarta. Pertemuan yang diikuti sebelas negara Pasifik tersebut berhasil mengadopsi *Chair's Summary* atau Kesimpulan Keketuan Indonesia.

Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, didaulat menyampaikan kesimpulan tersebut. "IPPP ini bertujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam membina kemitraan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik berdasarkan pada komitmen bersama untuk meningkatkan konektivitas regional dan pembangunan inklusif untuk mengatasi tantangan regional dan global yang beraneka ragam dan belum pernah terjadi sebelumnya," ucap Fadli saat membacakan pembukaan dokumen *Summary* tersebut.

Lebih lanjut, Mantan Wakil Ketua DPR 2014-2019 tersebut menyampaikan sejumlah hal strategis yang terangkum dalam *Chair's Summary* tersebut, sebagai bentuk komitmen penuh institusi DPR dan parlemen-parlemen Kepulauan Pasifik dan penegasan kesamaan pandangan dalam melihat dinamika yang terjadi di Pasifik.

*Summary* yang disepakati secara konsensus tersebut memuat, pertama, penegasan kembali komitmen untuk meningkatkan konektivitas ekonomi, politik, dan sosial di kawasan, dengan visi menjadikan Pasifik sebagai kawasan yang terintegrasi dan saling terhubung erat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan kolektif.

Kedua, komitmen teguh untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional, membangun ketahanan, dan menciptakan kesejahteraan bagi semua berdasarkan prinsip saling percaya dan menghormati kedaulatan serta integritas teritorial setiap negara melalui trek diplomasi parlemen.

Ketiga, penegasan cara pandang lautan samudera sebagai perekat, bukan pemisah, dengan menghormati keragaman budaya, peningkatan keterlibatan diplomatik dan politik sebagai elemen pemersatu dalam kerangka memperlakukan kerja sama dan saling pengertian yang lebih berkelanjutan.

Keempat, menekankan perhatian bersama terhadap isu ketidakpastian ekonomi, dampak nyata perubahan iklim, degradasi laut, dan bencana alam, ancaman ketahanan pangan, dan keamanan maritim.

Kelima, urgensi peningkatan kolaborasi, kemitraan, dan konektivitas berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial untuk membangun landasan bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan regional.

Keenam, urgensi diplomasi parlemen untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, tangguh, dan sejahtera bagi semua.

Ketujuh, keprihatinan terhadap degradasi lingkungan laut, Samudra, dan keanekaragaman hayati laut akibat sampah laut, polusi air, plastik, dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan, yang semua tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan, kemajuan ekonomi, dan pembangunan yang inklusif.

Kedelapan, urgensi interaksi yang lebih erat antara Indonesia dan negara-negara di Pasifik, khususnya melalui pertukaran di bidang pendidikan, sosial budaya, dan hubungan antarmasyarakat.

Kesembilan, urgensi Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai platform untuk meningkatkan konektivitas regional.

Kesepuluh, urgensi mendorong pembangunan regional dalam mempercepat pencapaian SDGs yang inklusif melalui pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan dan ekonomi biru seperti di sektor perikanan dan akuakultur, konektivitas pelabuhan, energi terbarukan, mempromosikan produksi dan penggunaan pangan yang berkelanjutan, pariwisata bahari yang berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda di sektor maritim.

Kesebelas, urgensi peningkatan kerja sama dalam mengurangi dampak perubahan iklim, mengejar tindakan adaptasi iklim terutama untuk rehabilitasi lahan pesisir, perlindungan ekosistem laut, dan pemberdayaan masyarakat di Pasifik.

Keduabelas, urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis, yang didukung oleh peran penting teknologi komunikasi, infrastruktur digital, dan jaringan transportasi.

Ketigabelas, forum berkomitmen memanfaatkan IPPP sebagai platform penting untuk keterlibatan regional dengan mengembangkan forum tersebut sebagai majelis parlemen Indonesia dan kawasan Pasifik.

Hal lain ditegaskan Fadli adalah terkait komitmen DPR untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen negara-negara Pasifik di bidang pengembangan kapasitas, perancangan undang-undang, inovasi teknologi di parlemen, pertukaran informasi, dan publikasi media yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran sekretariat parlemen.

Untuk diketahui, IPPP ke-2 tersebut sebagai kontinuitas dari IPPP perdana yang diselenggarakan pada Juli 2018. IPPP ke-2 ini diikuti delegasi parlemen dari kawasan Pasifik yaitu Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua New Guine, Masrhall Islands, Samoa, Solomon, Tonga, dan Tuvalu.

Delegasi Indonesia dipimpin langsung Puan Maharani dengan anggota Lodewijk Freidrich Paulus, Fadli Zon, Gilang Dhielafararez, Putu Supadma Rudana, Sukamta, Kris Dayanti, Irine Yusiana, Puteri Komarudin, Dyah Roro, Syahrul Aidi Maazat, Dewi Coryati, dan Robert Joppy Kardinal.